

## Kesiapan Kabupaten Sumbawa Barat Pada Program *Smart Village*: Tinjauan Domain *Smart Economy*

Agus Jayadi, Ahdi Topan Sofyan, Muhammad Afif Lillah, Ariesta Ramdhani

Universitas Cordova  
agusjayadi.undova@gmail.com

### Article History

accepted 10/11/2023

approved 25/11/2023

published 17/12/2023

### Abstract

*This research aims to analyze how prepared Taliwang District, West Sumbawa Regency is towards implementing the smart village program, specifically in the smart economy aspect. The research applies an online survey method, using a Likert scale questionnaire (strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree). The research respondents consisted of 114 people in West Sumbawa Regency from various fields of work, covering 47 villages from seven sub-districts in KSB. The research results showed that several aspects measured received less approval from respondents in codes EB2, EB3, and EA. The three stated the readiness of the village government in KSB to increase community economic empowerment (empowerment), realize digital-based economic transactions at the village level, and adopt information & communication technology to increase employment opportunities and village welfare in the KSB area through competitive economic development and transactions. non-cash finance. The results of the analysis using the Rasch model from the respondents' criteria, obtained results in the form of 1) Strongly Disagree 2%; 2) Disagree 6%; 3) Agree 46%; and 4) Strongly Agree 46%. It can be concluded that the majority of the KSB community is ready and agrees with the KSB Government program in building a smart city, especially in the smart economy domain.*

**Keywords:** *Smart Village, Smart Economy, KSB Government*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesiapan Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju implementasi program desa pintar (smart village), secara spesifik pada aspek smart ekonomi. Penelitian menerapkan metode survei secara online, melalui angket skala Likert (sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju). Responden penelitian terdiri dari 114 orang di Kabupaten Sumbawa Barat dari berbagai bidang pekerjaan, mencakup 47 desa dari tujuh kecamatan di KSB. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek yang diukur mendapatkan respon kurang disetujui oleh responden pada kode EB2, EB3, dan EA. Ketiganya menyatakan tentang kesiapan pemerintah desa di KSB dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (empowerment), mewujudkan transaksi ekonomi berbasis digital di tingkat desa, dan mengadopsi teknologi informasi & komunikasi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan desa di wilayah KSB melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan transaksi keuangan yang non tunai. Hasil analisis dengan model Rasch dari kriteria responden, diperoleh hasil berupa 1) Sangat Tidak Setuju 2%; 2) Kurang Setuju 6%; 3) Setuju 46%; dan 4) Sangat Setuju 46%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat KSB telah siap dan setuju dengan program Pemerintah KSB dalam membangun kota pintar, khususnya pada domain smart smart economy.

**Kata kunci:** Desa Pintar, Ekonomi Pintar, Pemerintah KSB



## PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah di Indonesia mengalami perubahan sejak masuk era revolusi industri 4.0 yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah manusia memproduksi, mengolah data, menyebarkan seluruh informasi serta mencapai sistem yang lebih efektif dan efisien (Ella & Andari, 2019). Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi informasi tidak hanya menyangkut hak atas akses informasi, tetapi juga memiliki kaitan yang erat dengan disparitas pembangunan yang belum dapat dinikmati secara merata oleh semua masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan wilayah seperti tingkat kesejahteraan yang rendah, kualitas SDM yang buruk, kesenjangan digital, kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang tinggi (Mafdhul *et al.*, 2022). Pembangunan antara kota dan pedesaan yang tidak merata menjadi suatu alasan diperlukannya sebuah reformasi dalam meningkatkan daya saing wilayah (Afifah, 2021).

Pembangunan pedesaan saat ini menjadi fokus utama, karena masyarakat pedesaan tidak mendapat manfaat yang berarti dari adanya pembangunan di perkotaan. Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan desa menjadi hal yang harus diprioritaskan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengangkat daerah pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi dan sosial (Subagyo *et al.*, 2022). Upaya pembangunan desa dapat melalui program-program desa yang inovatif, dan lebih lanjut akan menginisiasi munculnya model pembangunan desa berbasis konsep *smart village* (Subekti & Damayanti, 2019). Konsep ini diadopsi dari konsep *smart city* yang lebih dulu dikenal di Indonesia (Nurrahman, 2022). *Smart village* merupakan turunan dari konsep *smart city* yang lebih dulu menerapkan era 4.0 dalam pembangunan wilayah perkotaan (Malek & Baharudin, 2019). *Smart village* merupakan salah satu inovasi dalam memajukan perkembangan desa dengan berbasis teknologi informasi dalam mengatasi permasalahan pada kawasan rural (Tosida *et al.*, 2022). Konsep pengembangan *smart village* ini tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan keadaan desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Wargadinata, 2021).

Penelitian dengan fokus *smart village* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Subekti & Damayanti, 2019), berfokus pada penerapan model *smart village* dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menggunakan konsep peluang dan tantangan *smart village* dalam pengelolaan desa wisata yang dikembangkan oleh *European Network for Rural Development* dimana terdapat 6 (enam) dimensi dalam *smart village* yaitu *smart people*, *smart promotion*, *smart environmental*, *smart economy* dan *smart government*. Temuan penelitian tersebut bahwa upaya dalam penerapan model *smart village* belum maksimal, hal ini dilihat pada aspek masyarakat dan pemerintah yang belum siap dalam pembangunan *smart village*. Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Mulyono *et al.*, 2021) yang memfokuskan pada pengembangan konsep *smart village* bagi desa-desa di Indonesia. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Kelvin *et al.*, 2022) dengan judul *Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji* bertujuan untuk menganalisis model kolaborasi penta helix pada *Smart Village* Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan dimensi lima aktor dalam kolaborasi model *penta helix*, yaitu akademisi, bisnis, komunitas atau masyarakat, pemerintah, dan media. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran setiap aktor *penta helix* dalam mewujudkan *smart village* di Kelurahan Pondok Ranji perlu lebih dioptimalkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, aktor yang dominan dalam pelaksanaan *Smart Village* Kelurahan Pondok Ranji adalah

aktor komunitas atau masyarakat, namun memiliki keterbatasan sumber daya sehingga diperlukan peran aktor lain secara spesifik dan sistematis.

Digitalisasi telah diterapkan di kota dan desa sebagai bagian dari pembangunan. Beberapa indeks yang ada antara lain Indeks Desa Berkembang, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indeks Smart City, Indeks E-Government, dan Kerangka Kerja Kesiapan Kota Digital (Yusuf et al., 2021). Sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mengembangkan desa pintar, maka diperlukan pengukuran kesiapan pada setiap aspek pendukungnya. Berbagai kajian tentang komponen pendukung pembangunan desa pintar telah dipaparkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa kesiapan membangun desa pintar dapat diukur melalui kesiapan sumber manusia, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan dukungan terhadap penerapan teknologi atau proses digitalisasi (Azizaton, 2021; Utomo & Tamma, 2022). Implementasi desa pintar pada aspek ekonomi, salah satunya adalah inovasi *cashless* pada transaksi jual beli. Teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menawarkan kemudahan bagi pengguna, lembaga keuangan, dan bisnis (Hartatik et al., 2021). Dengan demikian, dibutuhkan analisis terhadap kesiapan masyarakat desa dalam menerapkan ekonomi digital, sebagai upaya mendukung pembangunan desa pintar. Aspek berikutnya adalah pada kesiapan masyarakat mendukung keberlanjutan dalam hal menjaga lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan didukung oleh kesadaran masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga dapat mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan yang tertata rapi, hijau, bersih, dan sehat (Nurdiani et al., 2021). Pengukuran terhadap kesiapan akan implementasi desa pintar yang banyak diadopsi pada berbagai penelitian adalah model *e-readiness* (Darmawan, et al., 2022; Iqbal, 2021; Malchenko, 2020).

*E-readiness* secara lengkap mengukur pada kesiapan berbagai aspek pendukung dari implementasi desa pintar pada semua domain. Meskipun banyak perspektif tentang model *e-readiness*, namun secara umum *e-readiness* disepakati pada kesiapan baik individu, pemerintah, maupun demografi wilayah terhadap penggunaan teknologi digital menuju tercapainya pembentukan desa pintar. *E-readiness* secara singkat mencakup komponen berupa TIK, tata kelola pemerintahan, dan SDM atau masyarakat (Alfaat, 2020). *E-readiness* juga berkembang menjadi enam kriteria meliputi *awareness* (kepedulian), *governance* (tata kelola), sumber daya bisnis, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan adopsi (Gella & Dwiatmadja, 2022). Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mulai mencanangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memperkuat peta jalan pemerintahan digital yang akan dimulai pada tahun 2023 (Sumbawa Barat, 2022). Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi para akademisi untuk dapat berkontribusi bagi perjalanan digitalisasi tata kelola di KSB, untuk terus mengkaji sejauh mana kesiapan KSB dalam menuju digitalisasi sistem pemerintahan menuju pembentukan *smart city* dan *smart village*. Untuk itu diperlukan telaah lebih lanjut tentang kesiapan KSB dalam menerapkan program *smart village*, terutama aspek *smart economy*, sebagai faktor yang mendukung kesiapan penerapan *smart village* di KSB, khususnya pada aspek penerapan teknologi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kominfo RI.

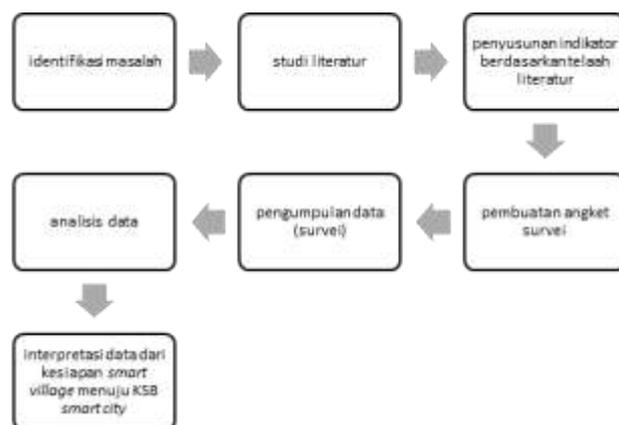
Berdasarkan berbagai kajian literatur dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator keberhasilan penerapan *smart village* di suatu wilayah meliputi infrastruktur teknologi, keterlibatan masyarakat dalam partisipasi aktif pada penentuan kebijakan pemerintah, dan optimalisasi pemerintah dalam menerapkan transparansi, efektifitas, dan efisiensi layanan kepada publik. Maka, pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap kesiapan Kabupaten Sumbawa Barat yang secara spesifik pada domain ekonomi pintar. Analisis diperoleh dari hasil survei pada masyarakat dan pihak pemerintah desa, dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan KSB dalam menerapkan

program *smart village* yang menjadi bagian dari program *Smart City* KSB sampai tahun 2032.

### METODE

Penelitian menerapkan metode survei secara online (Alderete, 2021; Wibowo *et al.*, 2020) melalui angket skala Likert (sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju) untuk mendapatkan jawaban responden. Peneliti memilih responden secara *purposive* (penduduk dengan usia 18 tahun ke atas dan memiliki perangkat teknologi pribadi). Selanjutnya peneliti memilih responden secara *purposive* sebanyak 114 orang di Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggap dapat mewakili masyarakat usia produktif dari berbagai bidang pekerjaan (termasuk pegawai pemerintahan), serta mencakup 47 desa dari tujuh kecamatan di KSB (dari total 57 desa yang ada di KSB). Responden meliputi laki-laki sebanyak 45 orang, dan perempuan 69 orang, usia 18-23 tahun sebanyak 23 orang, usia 24-29 tahun sebanyak 16 orang, dan usia >30 tahun sebanyak 75 orang. Responden berasal dari Maluk 3 orang, Taliwang 34 orang, Brang Ene 23 orang, Seteluk 13 orang, Pato Tano 11 orang, dan Brang Rea 30 orang. Responden berdasarkan profesi pelajar 24 orang, guru 27 orang, dosen 3 orang, pengusaha 3 orang, pegawai pemerintah 46 orang, dan karyawan swasta 11 orang. Instrumen penelitian berupa angket survei, sebanyak 13 soal pertanyaan. Angket berisi demografi responden meliputi jenis 1) kelamin, 2) usia, dengan rentang tahun 18-23, 24-29, dan >30, dan 3) profesi, meliputi pelajar, guru, pengusaha, pegawai pemerintah, dan karyawan swasta (Darmawan, *et al.*, 2022). Angket berisi kuisioner yang dikembangkan dari keterpaduan indikator hasil analisis peneliti berdasarkan domain *smart economy*, yang bersumber dari sasaran target pencapaian kota pintar KSB (Kabupaten Sumbawa Barat, 2022), dan pengukuran kesiapan dengan instrumen angket *e-readiness* hasil pengembangan dari (Gella & Dwiatmadja, 2022).

Responden juga ditanya pemahaman tentang internet, kendala, dan rata-rata jumlah penggunaan internet setiap harinya. Penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu penyusunan indikator, pengumpulan data (survei) dan analisis kesiapan (*e-readiness*) berdasarkan analisis politomi model Rasch. Tahapan tersebut diilustrasikan dalam diagram alir di bawah ini:



**Gambar 1. Alur Penelitian**

Hasil survei akan memberikan data berupa angket dengan kategori sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Data tersebut selanjutnya diinterpretasi awal oleh peneliti dalam bentuk skoring 1 untuk sangat tidak setuju, sampai skor 4 untuk kategori sangat setuju. Skor-skor tersebut selanjutnya dianalisis dengan Model Rasch tipe politomi (Boone *et al.*, 2014) dengan software Winsteps 3.73. Politomi analisis dari model Rasch memberikan interpretasi yang jelas tentang pengurutan kategori dalam format peringkat, hal tersebut karena data skala persepsi

masih hanya berupa urutan (Naigaga et al., 2018). Politomi menggambarkan data skala persetujuan responden secara signifikan dan lebih baik daripada sekedar skala peringkat yang masih berbentuk data asli, juga mendeskripsikan lebih banyak informasi tentang data karena memperkirakan satu set parameter ambang batas untuk setiap item (Andrich, 2013). Hasil analisis berupa validitas dan reliabilitas angket, dan bagaimana kecenderungan responden dalam memberikan tanggapan terhadap kesiapan KSB dalam menuju kota pintar berdasarkan kondisi saat ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 13 butir angket telah mendapat jawaban dari 114 responden dari masyarakat di wilayah KSB. Persetujuan responden ditandai dengan nilai *measure* dari hasil analisis *measure item* pada model Rasch. Nilai *measure* memiliki satuan logit (logaritma odd unit), semakin tinggi nilai *measure* maka semakin rendah persetujuan responden terhadap butir angket. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai *measure*, maka semakin tinggi persetujuan responden terhadap setiap angket yang mengukur kesiapan masyarakat di KSB pada penerapan desa pintar. Tabel 1 menunjukkan rentang persepsi responden, meliputi *measure* dengan nilai logit  $\geq 1,00$  adalah kategori kurang setuju,  $1 > \text{measure (logit)} \geq 0,0$  adalah kategori setuju, dan  $0,0 > \text{measure (logit)}$  adalah kategori sangat setuju. Nilai *measure* menjadi kriteria kevalidan butir angket, Tabel 3 menunjukkan bahwa sebaran perbedaan *measure* item secara seimbang, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah (Alnahdi, 2019).

Tabel 1. Nilai *measure* item

Item	Measure (Logit)	Item	Measure (Logit)	Keterangan	Keterangan
EB3	1,13	Kurang Setuju	EK2	0,23	Setuju
EA	1,08	Kurang Setuju	ET2	0,03	Setuju
EB2	1,02	Kurang Setuju	EP3	-0,10	Sangat Setuju
ET3	0,96	Setuju	ET1	-0,62	Sangat Setuju
EB1	0,78	Setuju	EP2	-0,69	Setuju
EK1	0,72	Setuju	EP1	-0,76	Sangat Setuju
EK3	0,29	Setuju			

Berdasarkan nilai *measure item* hasil analisis model Rasch pada setiap item, peneliti mengelompokkan berdasarkan skala yang telah peneliti tetapkan yakni Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Pada setiap domain, peneliti menggali kesiapan masyarakat desa pada setiap kecamatan di wilayah KSB, meliputi aspek Kepedulian (P), Tata kelola (T), Komitmen (K), Bisnis (B), Adopsi teknologi (A).

Tabel 2. Hasil respon angket kesiapan desa pintar pada domain *smart economy*

Hasil Analisis	Kode Angket	Indikator
Setuju	EB1	Masyarakat desa di KSB mampu mengembangkan sektor industri lokal seperti pariwisata atau pertambangan dari potensi daerah
kurang setuju	EB2	Masyarakat desa di KSB mampu meningkatkan

Hasil Analisis	Kode Angket	Indikator
kurang setuju	EB3	pemberdayaan ekonomi masyarakat ( <i>empowerment</i> ) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan desa di wilayah KSB Masyarakat desa di KSB mampu mewujudkan transaksi ekonomi berbasis digital di tingkat desa di wilayah KSB
Setuju	EK1	Pemerintah desa memiliki program peningkatan potensi sektor industri lokal yang dipahami oleh masyarakat KSB, khususnya pada industri pariwisata, pengolahan hasil pertambangan, serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di wilayah KSB
Setuju	EK2	Pemerintah desa memiliki program dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ( <i>empowerment</i> ) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah KSB
Setuju	EK3	Pemerintah desa memiliki program untuk mendukung pembangunan ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran dan mempermudah pembayaran menuju masyarakat di KSB yang <i>cash less</i>
Sangat setuju	EP1	Siap mendukung pengembangan sektor industri lokal seperti pariwisata atau pertambangan dari potensi daerah di setiap desa di KSB
Sangat setuju	EP2	Siap berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ( <i>empowerment</i> ) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah KSB
Sangat setuju	EP3	Siap berperan serta dalam mewujudkan transaksi ekonomi berbasis digital di tingkat desa di wilayah KSB
Sangat setuju	ET1	Pemerintah desa di wilayah KSB mendukung pengembangan sektor industri (pariwisata, pertambangan, hasil pertanian dan perkebunan) lokal dari potensi daerah di KSB
Setuju	ET2	Pemerintah desa berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ( <i>empowerment</i> ) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah KSB
Setuju	ET3	Pemerintah desa mendukung pembangunan ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran dan mempermudah pembayaran menuju masyarakat di KSB yang <i>cash less</i>
Kurang setuju	EA	Pemerintah desa di wilayah KSB sebaiknya mengadopsi teknologi informasi & komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan transaksi keuangan yang non tunai

Tabel 2 menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap kesiapan membangun desa pintar dari sisi perekonomian. Berdasarkan tabel terlihat sebagian beberapa aspek yang diukur mendapatkan respon kurang disetujui oleh responden pada kode EB2, EB3, dan EA. Ketiganya menyatakan tentang kesiapan pemerintah desa di KSB dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*), mewujudkan transaksi ekonomi berbasis digital di tingkat desa, dan mengadopsi teknologi informasi & komunikasi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan desa di wilayah KSB melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan transaksi keuangan yang non tunai. Temuan ini menjadi informasi berharga, bahwa strategi membangun kota pintar pada domain perekonomian, pada hal tertentu masih belum mendapatkan respon baik dari masyarakat. Respon yang kurang baik bisa jadi disebabkan masyarakat masih berada pada taraf perekonomian yang rendah, atau belum adanya dukungan dari pihak pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dari setiap desa di KSB. Temuan tersebut menjadi informasi penting bagi semua pihak yang berkaitan, bahwa masyarakat sangat berharap adanya program nyata pemerintah dalam meningkatkan potensi ekonomi pada setiap desa di KSB. Lebih lanjut, program-program tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KSB. Berdasarkan hasil analisis dengan model Rasch dari kriteria responden, diperoleh hasil berupa 1) Sangat Tidak Setuju 2%; 2) Kurang Setuju 6%; 3) Setuju 46%; dan 4) Sangat Setuju 46%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat KSB telah siap dan setuju dengan program Pemerintah KSB dalam membangun kota pintar, khususnya pada domain *smart smart economy*.

*Smart city* menjadi istilah yang tidak lagi asing bagi masyarakat, dan menjadi strategi pembangunan perkotaan yang menggabungkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi permasalahan perkotaan (Malek & Baharudin, 2019). *Smart city* menjadi upaya dalam pembangunan perkotaan di era modern, seperti pengembangan aplikasi *e-commerce*, *e-governance*, *e-budgeting*. Istilah *smart city* terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien, serta alat untuk melakukan inovasi pembangunan perkotaan untuk mempercepat daya saing perkotaan dengan dukungan kemajuan teknologi (Sutriadi, 2018). Pengembangan *smart city* dapat diwujudkan melalui pertama, pengembangan *city branding* produk unggulan yang merupakan potensi wisata. Kedua, peningkatan jumlah tenaga ahli dan terampil melalui penyediaan fasilitas pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi. Ketiga, menyediakan layanan publik berbasis TIK untuk mendukung kegiatan semua sektor berupa *e-government* di sektor pemerintahan atau *e-commerce* di sektor perdagangan. Keempat, pengembangan sistem ekonomi melalui industri kecil, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (UMKM) (Pangestu & Anggraini, 2022).

Sebagaimana upaya pemerintah dalam membangun *smart city* di Indonesia, sebagai pendukung *smart city* dapat dimulai dengan membangun *smart village* (desa pintar) (Alhari & Fajrillah, 2022). Pemerintah telah memiliki perhatian melalui kebijakan pembangunan pedesaan nasional (UU No. 6 Tahun 2014), yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis menuju masyarakat yang adil dan makmur. Istilah desa didefinisikan sebagai kawasan pedesaan, meliputi kegiatan pertanian atau termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Eneng Tita Tosida et al., 2022). Pembangunan pedesaan harus didorong secara cerdas (atau dalam konteks global dikenal dengan istilah *smart village*) sebagai penetapan tujuan pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa pintar dapat diupayakan diantaranya melalui pelestarian adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, dukungan terhadap partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi desa demi kesejahteraan bersama, pemerintahan

desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan akuntabel, peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, dan dukungan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat perdesaan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan nasional (Ilham et al., 2022). Konsep lain dari *smart village* adalah akses terhadap layanan energi berkelanjutan sebagai upaya percepatan pembangunan, termasuk penyediaan pendidikan dan kesehatan yang baik, akses terhadap air bersih, sanitasi dan nutrisi, pertumbuhan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan, dan peningkatan keamanan, kesetaraan gender, dan keterlibatan demokratis. Upaya membentuk desa pintar secara praktis dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi yang efektif dan efisien, yang didukung oleh teknologi tepat guna hingga teknologi tinggi. Pengembangan desa pintar bidang ekonomi melalui sektor primer dan sekunder yang dapat memfasilitasi hubungan yang harmonis dengan sektor tersier dan kuartal kawasan pertumbuhan (daerah perkotaan) (Sutriadi, 2018).

### SIMPULAN

Sumbawa Barat menjadi salah satu kota yang menargetkan implementasi kota pintar pada tahun 2023, sehingga dibutuhkan data kesiapan baik masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai target tersebut. Telah dilakukan survei terhadap kesiapan masyarakat desa di wilayah KSB dalam upaya penerapan desa pintar. Survei dibatasi pada domain yang diadopsi dari kota pintar meliputi *smart economy*, *smart society*, dan *smart environment*. Survei dilakukan platform media google formulir, sebanyak 43 butir angket. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan meliputi 1) masyarakat menyetujui kesiapan pemerintah dalam membangun desa pintar pada tiga domain, yang ditunjukkan dengan hasil analisis Rasch model, dan hanya dalam prosentasi kecil merasa kurang setuju; 2) faktor yang mendukung kesiapan dari pembangunan desa pintar di KSB terlihat dari survei pemahaman dan intensitas masyarakat dalam menggunakan teknologi internet; 3) faktor yang menghambat adalah masih ditemukan masyarakat yang belum menyetujui akan kesiapan pemerintah KSB dalam menuju desa pintar, diantaranya pemerintah belum maksimal dalam mengadopsi teknologi dalam mewujudkan interaksi masyarakat dan ekosistem belajar yang efisien untuk mencapai sistem keamanan dan ketahanan masyarakat. Penelitian ini menjadi informasi penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mendukung KSB menjadi desa pintar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, V. N. (2021). Identifikasi Potensi Pengembangan Konsep Smart Village Pada Desa Wisata Rende Kabupaten Bandung Barat. *FTSP Series: Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir*, 1–6.
- Alderete, M. V. (2021). Determinants of smart city commitment among citizens from a middle city in argentina. *Smart Cities*, 4(3), 1113–1129. <https://doi.org/10.3390/smartcities4030059>
- Alfaat, F. H. (2020). The Readiness Of Palangka Raya City Government Towards The Smart City. *International Journal of Kybernology*, 5(2), 302–311.
- Alnahdi, G. H. (2019). Rasch validation of the Arabic version of the Teacher Efficacy for Inclusive Practices (TEIP) scale. *Studies in Educational Evaluation*, 62(February), 104–110. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.05.004>
- Andrich, D. (2013). An Expanded Derivation of the Threshold Structure of the Polytomous Rasch Model That Dispels Any “Threshold Disorder Controversy.” *Educational and Psychological Measurement*, 73(1), 78–124. <https://doi.org/10.1177/0013164412450877>
- Azizaton, B. (2021). Readiness Analysis of Structure Smart City in Wonogiri Regency. *International Seminar of Research Month, 2022*, 139–147. <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2424>

- Darmawan, A. K., Muhsi, M., Al Wajieh, M. W., Setyawan, M. B., Komarudin, A., & Ariyanto, F. (2022). Predicting Smart Regency Readiness on Sub-Urban Area in Indonesia: A perspective of Technology Readiness Index 2.0. *ICISS 2022, October*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICISS55894.2022.9915246>
- Darmawan, A. K., Umam, B. A., Ariyanto, F., Setyawan, M. B., Hamzah, M. A., & Asir, A. (2022). Understanding Smart Regency Services Readiness in Indonesia with TRAM Model. *2022 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications: Advanced Innovations of Electrical Systems for Humanity, ISITIA 2022 - Proceeding, August*, 169–174. <https://doi.org/10.1109/ISITIA56226.2022.9855303>
- Ella, S., & Andari, R. N. (2019). Utilization of ICT in Building a Smart Village Model for Village Development in Indonesia. In S. S.H., S. J., A. A.A., N. IGB.B., & B. Y. (Eds.), *International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)* (pp. 1–6). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISS48059.2019.8969820>
- Gella, D. G., & Dwiatmadja, C. (2022). Analisis Kesiapan Masyarakat Terhadap Implementasi Program Smart City Kota Kupang. *JURNAL NUANSA AKADMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 327–340.
- Hartatik, Firdaus, N., & Aziz, A. (2021). Go-Payment: Towards Cashless Payment System for Smart Village Application in Indonesia. *2021 3rd International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS)*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICORIS52787.2021.9649644>
- Iqbal, M. (2021). Smart Culture in Smart City Policies: A Case of Yogyakarta City. *Jassp*, 1(2), 87–92. <https://doi.org/10.23960/jassp.v1i2.8>
- Kabupaten Sumbawa Barat. (2022). *Buku III Executive Summary Masterplan Smart City Kabupaten Sumbawa Barat 2023-2032*.
- Kelvin, Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 7(2), 1–15.
- Mafdhol, R., Hasan, M., & Safwan, S. (2022). Implementation of Smart City Policy To Advance the Economy in Banda Aceh City (Case Study: Urt Cinta Kasih Housing, Panteriek Village) Aceh Province. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 4(3), 90–99. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v4i3.24504>
- Malchenko, Y. A. (2020). From digital divide to consumer adoption of smart city solutions: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Vestnik of Saint Petersburg University. Management*, 19(3), 316–335. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu08.2020.302>
- Malek, J. A., & Baharudin, R. A. (2019). Smart City (SC)-Smart Village (SC) and the “Rurban” concept from a Malaysia-Indonesia perspective. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 2019(Special Issue), 1–7.
- Mulyono, R. D. A. P., Sularso, R. A., Afandi, M. F., & Arif, A. (2021). Pengembangan Smart Village dengan Manajemen Database Administrasi Desa Klungkung “Simakung” melalui One Gate System. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 1(3), 118–126. <https://doi.org/10.51214/japamul.v1i3.190>
- Naigaga, D. A., Pettersen, K. S., Henjum, S., & Guttersrud, Ø. (2018). Assessing adolescents’ perceived proficiency in critically evaluating nutrition information. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12966-018-0690-4>
- Nurdiani, N., Saragih, J. F. B., & Wijaksono, S. (2021). Improving the urban village environmental quality through a conscious approach to clean healthy living behaviors in Palmerah, Jakarta - Indonesia. In M. D. (Ed.), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 794, Issue 012173, pp. 1–6). IOP Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012173>

- Nurrahman, A. (2022). Pengembangan Desa Sukapura Menuju Smart Village. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 89–109.
- Subagyo, A., Rohayatin, T., Pujilestari, N. A., & Wulandari, W. (2022). Smart Village Concept Training In West Bandung Regency Village Government. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 352–356.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358>
- Sumbawa Barat, P. (2022). *Buku IV Quickwins Smart City Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023-2032*.
- Tosida, E. T., Herdiyeni, Y., Marimin, & Suprehatin, S. (2022). Investigating the effect of technology-based village development towards smart economy: An application of variance-based structural equation modeling. *International Journal of Data and Network Science*, 6(3), 787–804. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.3.002>
- Utomo, I. H., & Tamma, R. A. (2022). Readiness of Smart City Implementation in Klaten, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2022, 357–367. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10563>
- Wargadinata, E. L. (2021). The Leadership Role in The Smart-Village Program in Banyuwangi District, East Java. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1429>
- Warrad, L., & Khaddam, L. (2020). The effect of corporate governance characteristics on the performance of jordanian banks. *Accounting*, 6(2), 117–126. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.001>
- Wibowo, T. S., Endroyono, & Pratomo, I. (2020). Analysis of Malang City Readiness in Realizing Smart Tourism with New Integrated E-Readiness Model. *Proceeding - ICoSTA 2020: 2020 International Conference on Smart Technology and Applications: Empowering Industrial IoT by Implementing Green Technology for Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1109/ICoSTA48221.2020.1570616406>
- Yusuf, M., Hariyanto, H., Iswahyudi, M. S., Sulyani, A. C., Satoto, B. D., Sophan, M. K., Anamisa, D. R., & Oseni, K. O. (2021). Digital Village Index (DVI) for Indonesia Case Study. *2021 5th International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICoS)*, 244–248. <https://doi.org/10.1109/ICICoS53627.2021.9651783>